

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

#### **1. Upaya Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2019**

Pemerintah Daerah Kota Kupang melakukan upaya untuk meraih opini WTP yaitu dengan cara:

- a. Laporan Keuangan Pemda yang disusun selalu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penjelasan/pengungkapannya cukup.
- b. Dalam pengelolaan dan tata usaha keuangan daerah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern yang ada, sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang menguasai akuntansi keuangan daerah yang ditempatkan di SKPD dan PPKD. Demikian juga peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
- e. Meningkatkan kualitas hasil reviu atas LKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sehingga LKPD yang telah direviu berkualitas dan pada akhirnya tidak banyak kesalahan/temuan apabila di audit oleh BPK RI.

## **2. Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Kota Kupang atas Rekomendasi BPK**

Pemerintah daerah sudah mengikuti serta menginstruksikan kepada dinas-dinas terkait mengenai rekomendasi dari BPK dan dilakukan langkah-langkah yang represif, namun masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan benar, masih terdapat beberapa masalah yang belum bisa diatasi dan menjadi kendala, misalnya temuan atas kelebihan penyeteroran tindak lanjutnya disetor kembali ke kas daerah. Masih ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sistem penatausahaan dan pengelolaan aset tetap yang kurang baik, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan SAP dan rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Tindak lanjut yang dibuat sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemda Kota Kupang mengeluarkan surat berupa surat teguran dan pemberitahuan yang bersifat tegas.

## 6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Daerah harus memprioritaskan kemampuan calon pegawai dalam hal akuntansi dan penganggaran untuk ditempatkan pada bagian keuangan yang pada dasarnya merupakan bagian yang paling sering terjadi masalah.
- b. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK di tahun-tahun sebelumnya atas temuan berdasarkan kriteria umum yaitu ketidakefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah, khususnya di bidang asset dan akuntansi harus dibenahi pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., Randal, J. & S.B, M. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (Dua Belas). Erlangga.
- Arief Atmaja, RM Syah dan Probohudono, Agung Nur. 2015. *Analisis Audit BPK RI terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakepatuhan dan kerugian Negara*.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK- RI, 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I& II Tahun 2018*, Jakarta. <http://www.bpk.go.id/>
- BPK- RI, 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I& II Tahun 2019*, Jakarta. <http://www.bpk.go.id/>
- Elli Widya,(2011). *Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pemerintah Daerah*. BPF.
- Halim, Abdul (2008). *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan UPP STIMYKPN*. Jogjakarta.
- Ihwandi, Lalu Riza (2016). *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Kasus Kabupaten Lombok).
- Irwanto rante, Agustinus sale dan Elsyhan R. Marlissa, 2010. *Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang*, jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah
- LHP-LKPD Kota Kupang Tahun 2018. <http://www.Kupang.bpk.go.id>. (4 November 2020)
- LHP-LKPD Kota Kupang Tahun 2019. <http://www.Kupang.bpk.go.id>. (4 November 2020)
- Mulyadi, 2002. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Muryanto, Budiarmo dan Ramadana. 2005. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. LPKPAP.BPPK RI
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang  
*Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung:  
Alfabeta

Taufikrahman,2014. *Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini  
Audit oleh BPK-RI atas LKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sumatera  
Utara,* Tesis, Universitas Sumatera Utara.